

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pendidikan sebagai roda penggerak kebudayaan dan kebiasaan yang pada umumnya memiliki tujuan untuk mencetak generasi cerdas dan memiliki karakter yang berbudi serta mendorong perubahan seseorang untuk menjadi lebih baik. “Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) merumuskan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang harus digunakan dalam mengembangkan upaya pendidikan di Indonesia”. “Pasal 3 UU Sisdiknas menyebutkan Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Negara Indonesia memiliki cita-cita mulia yang tertera didalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 pada bagian alinea empat bahwasanya mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tanggung jawab negara. Kebijakan merdeka belajar muncul karena adanya harapan dan cita-cita yang tinggi untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang cerdas, adil, arif dan bijaksana. Menjadi negara yang dapat menciptakan kehidupan seluruh rakyatnya menjadi lebih baik. Maka, dalam rangka memenuhi keinginan dan cita-cita rakyat Indonesia setiap hal yang berhubungan dengan pendidikan harus di kedepankan. Lembaga pendidikan harus berupaya lebih keras dalam mengembangkan pendidikan sesuai dengan perkembangan zaman (Hutabarat, 2022). Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kualitas SDM juga

merupakan kebutuhan profesi dan juga tuntutan dari dampak pesatnya perkembangan teknologi.

Dari keinginan yang begitu besar dan mulia ada banyak hal yang dinilai menghambat perkembangan pendidikan di Indonesia, mengingat banyaknya SDM yang dimiliki membuat permasalahan kesenjangan pendidikan begitu terlihat menonjol akibat kurang meratanya pendidikan di Indonesia. Berbagai usaha pemerintah agar dapat membangkitkan pendidikan di Indonesia seperti halnya pengalokasian dana untuk beasiswa bagi siswa kurang mampu dan berprestasi mulai dari sekolah tingkat dasar hingga tingkat perguruan tinggi, baik didalam negeri maupun luar negeri, dalam hal ini pemerintah juga memberlakukan aturan wajib belajar 12 tahun.

Indonesia dalam sejarahnya selalu mengarah pada sebuah kemajuan. Hal ini dapat dilihat dari upaya pemerintah untuk terus memberlakukan kebijakan-kebijakan. Seperti kebijakan yang sedang berlaku saat ini semata-mata untuk mencapai tujuan utama pemerintah, dimana kebijakan tersebut peningkatan indikatornya hanya berfokus pada pertama, numerasi sebagai upaya untuk meningkatkan kecakapan materi yang berkaitan dengan angka-angka. Kedua, literasi sebagai upaya untuk meningkatkan kecakapan setiap individu dalam menelaah bacaan serta mendalami karakter dalam melakukan pembelajaran terkait dengan keragaman dan sebagainya (Marisa, 2022).

Kebijakan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah kebijakan Merdeka Belajar. Kebijakan Merdeka Belajar merupakan program sudah yang digerakkan oleh Nadiem Anwar Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada saat masa awal era kepemimpinannya tahun 2019. Berdasarkan sambutan dari beliau, dasar dari digerakkannya kebijakan ini adalah karena banyaknya masyarakat yang mengaduh

dengan sistem pendidikan yang saat ini sedang berlaku, banyak dari bagian peserta didik yang sudah dinyatakan lulus sebelum memperoleh hasil kelulusannya. Berdasarkan pembenaran dari Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Supriano, induk dari kebijakan kurikulum baru ini menurut Nadiem beberapa diantaranya adalah ketetapan yang wajib dicapai peserta didik dalam memenuhi kompetensi ketercapaian melalui proses pembelajaran yang dilampauinya hingga sesuai dengan peraturan perundang-undangan. eksplanasi yang diberikan kepada peserta didik sesuai dengan penilaian yang diberikan oleh pihak sekolah atau guru, dikarenakan guru lebih mengenal kultur dan kebutuhan pembelajaran peserta didik yang sedang berlaku di daerah dimana guru dan peserta didik tersebut tinggal (Andiani, 2020).

Kebijakan Merdeka Belajar berfokus pada beberapa bahasan sebagai berikut, yaitu yang pertama tentang peniadaan sistem Ujian Nasional (UN), selanjutnya Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) yang diserahkan langsung kepada pihak sekolah, debirokratisasi format rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), dan tentang sistem zonasi penerimaan siswa baru (Mauidzati, 2020). Dimana kebijakan ini diberlakukan untuk mencapai tujuan kementerian pendidikan dan kebudayaan dalam misi meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, juga agar pelaksanaan pembelajaran lebi berinovatif.

Sejak dikeluarkannya “surat edaran nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan medeka belajar oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan yang menyatakan bahwa setiap tingkat pendidikan baik dari SD, SMP, hingga SMA, sudah selayaknya menerapkan kurikulum merdeka belajar secara serentak, tidak setengah-setengah atau hanya sebagian atau bahkan belum menerapkan sama sekali, tanpa perbedaan disetiap tingkatnya di seluruh wilayah Indonesia”.

Setiap lembaga juga berhak menentukan model pengimplementasian kurikulum merdeka khususnya dalam bidang evaluasi pembelajaran di lembaganya masing-masing menjadi ketertarikan tersendiri bagi penulis, sehingga penulis memutuskan judul dari penelitian ini adalah **“IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA DALAM EVALUASI PEMBELAJARAN PAI DI SMA NEGERI 1 SOOKO KABUPATEN MOJOKERTO”**

B. Fokus Penelitian

Dari konteks penelitian yang telah dipaparkan diatas, peneliti dapat menarik fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan kurikulum merdeka bidang evaluasi pembelajaran PAI yang diterapkan di SMA Negeri 1 Sooko Kabupaten Mojokerto?
2. Bagaimana implementasi kurikulum merdeka terhadap evaluasi pembelajaran PAI di SMA Negeri 1 Sooko Kabupaten Mojokerto?

C. Tujuan Penelitian

Dari fokus penelitian diatas, dapat diambil tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis kebijakan kurikulum merdeka bidang evaluasi yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Sooko Kabupaten Mojokerto.
2. Untuk menganalisis hasil implementasi kurikulum merdeka terhadap evaluasi pembelajaran PAI di SMA Negeri 1 Sooko Kabupaten Mojokerto.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini antara lain:

1. Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi tenaga pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu lembaganya.

2. Dapat dijadikan sebagai acuan bagi tenaga pendidikan untuk menyusun kebijakan sekolah dalam melakukan implementasi kurikulum merdeka.
3. Dapat dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui lebih dalam tentang ragam kebijakan sekolah dalam implementasi merdeka belajar.
4. Dapat memberikan sumbangan pengetahuan tentang implementasi kurikulum merdeka dalam evaluasi pembelajaran PAI di SMA Negeri 1 Sooko Kabupaten Mojokerto.

E. Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini masalah yang dijadikan fokus pembahasan adalah kebijakan implementasi kurikulum merdeka yang diterapkan oleh SMAN 1 Sooko khususnya dalam bidang evaluasi pembelajaran PAI pada kelas 10.

F. Definisi Istilah

Dalam penelitian ini, beberapa faktor penting yang dibahas yaitu:

1. Implementasi Kurikulum Merdeka

Implementasi kurikulum ditafsirkan sebagai suatu upaya pergerakan untuk mendapatkan goal yang diinginkan sehingga perubahan ini dapat lebih dekat kepada tujuan pendidikan ideal. Jadi, setiap sistem kerja rancangan implementasi hingga evaluasi kurikulum merupakan siklus perubahan.

2. Evaluasi Pembelajaran PAI

Dalam pengertian pembelajaran sebagai suatu sistem, evaluasi merupakan salah satu komponen yang sangat penting dan merupakan tahap yang harus dijalankan oleh seorang pendidik agar untuk mengetahui keefektifan pembelajaran. Sehingga hasil penilaian atau evaluasi yang diperoleh nanti dapat dijadikan umpan balik bagi guru dalam memperbaiki dan menyempurnakan program dan kegiatan pembelajaran. Jadi evaluasi pembelajaran PAI adalah

kegiatan yang dilakukan oleh seorang guru PAI dengan tujuan untuk mengetahui keefektifan pembelajaran yang sudah atau sedang dilaksanakan.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini terdiri dari V bab. Maka sistematika ini dibuat untuk memudahkan penyusunan skripsi sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, pada bab ini penulis menjelaskan tentang bagaimana konteks penelitian, merumuskan fokus penelitian, merumuskan tujuan penelitian, memaparkan manfaat dari penelitian, menentukan batasan penelitian, memberikan definisi istilah dari judul yang dikaji, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Kajian Kepustakaan, bab ini membahas tentang kajian pokok tema atau judul yang sedang dikaji.

Bab III : Metode Penelitian, berisi tentang pendekatan, jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, pengecekan keabsahan data, tahap penelitian.

Bab IV : Hasil dan Pembahasan, berisi tentang hasil-hasil dari penelitian yang kami lakukan terhadap objek penelitian dan pembahasan hasil dari temuan data. Pemaparan ini kami sajikan subjektif dan sebaik mungkin sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan.

Bab V : Penutup, merupakan bagian terakhir dari proses penelitian. Yang didalamnya berisi kesimpulan, yaitu beberapa inti kesimpulan yang kami coba paparkan setelah melalui tahap demi tahap penelitian ini. Dan juga berisi saran-saran, yang merupakan hasil kreasi kami dalam

memberikan masukan masukan guna mengatasi problematika yang sedang dihadapi obyek penelitian.

Daftar Pustaka mengandung sumber pustaka yang menjadi rujukan.

Lampiran memuat hasil penelitian yang merupakan sumber utama dalam menganalisis data yang berupa catatan lapangan, hasil wawancara , tabel data, foto dll.